



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 42/IV.01/HK/2020**

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Anggaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Arah Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2020 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Konfrehensif dengan Kode Rekening 5.03.01.17.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/42/IV.01/HK/2020
TANGGAL : 22 Januari 2020

**URAIAN KEGIATAN, FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020**

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke pemerintah pusat;
 - b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota;
 - c) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan
 - d) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan; pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan

- e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:

a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi :

- 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
- 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
- 3) klarifikasi peraturan daerah;
- 4) pemberian nomor register; dan
- 5) pembatalan peraturan kepala daerah.

b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan

c) capaian program pembentukan peraturan daerah.

9. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:

a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:

- 1) penurunan *stunting*;
- 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
- 3) eliminasi *tuberculosis* (TBC);
- 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
- 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:

- 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
- 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses

ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;

- 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - 11) pengelolaan data fakir miskin.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:

- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
- 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
- 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
- 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 7) pengawasan koperasi; dan
 - 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - 1) Pendidikan Menengah
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
 - 2) Pendidikan Khusus.
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;

- b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- 1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) pemetaan rawan kebakaran;
 - 9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);

- 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
 - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota;
 - 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - 10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan

- 5) program perlindungan anak/perindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:

- 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
- 2) pajak dan retribusi daerah;
- 3) hibah dan bantuan sosial;
- 4) belanja barang dan jasa;
- 5) belanja modal; dan
- 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.

b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.

c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

1. reuiv rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reuiv rencana kerja pemerintah daerah;
3. reuiv rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. reuiv laporan keuangan pemerintah daerah;
5. reuiv laporan kinerja;
6. reuiv penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan

9. pemeriksaan serentak kas opname;
10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APF.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

- Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:
1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APF dan Aparat Penghak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 2. operasionalisasi saku bersih pungutan har;
 3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
 4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
 5. dana desa;
 - a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan
 - b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan

6. bantuan operasional sekolah; dan
- a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah; dan
- b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

VI. PENGAWATAN REFORMASI BIROKRASI

- Pengawalan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:
1. penllatan mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan
pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APF;

- c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparat sipil negara;
- d. penilaian internal zona integritas;
- e. penanganan benturan kepentingan;
- f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
- g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEKAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APFP

Peningkatan kapasitas APFP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/42/IV.01/HK/2020
 TANGGAL : 22 Januari 2020

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2019												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kota Bandar Lampung			W.X3	BK.X3		W.X3		Q.Z.X3	W.X3		PJb.X3		X. Inspektorat Provinsi 1 : Irban Wilayah I 2 : Irban Wilayah II 3 : Irban Wilayah III 4 : Irban Wilayah IV BK : Berkala Kab/ Kota Pj : Panjab Kab/ Kota Q : Monev BOS W : MONEV DANA DESA Z : PENGAWASAN PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH
2	Kota Metro						W.X4	BK.QZ.X4					W.X4	
3	Kabupaten Lampung Selatan			W.X3		BK.X3	W.X3		Q.Z.X3	W.X3		PJb.X3		
4	Kabupaten Lampung Timur			W.X3	BK.X3		W.X3		Q.Z.X3	W.X3		PJb.X3		
5	Kabupaten Lampung Tengah			W.X2	BK.X2				Q.Z.X2				W.X2	
6	Kabupaten Lampung Utara						W.X1	BK.X1	Q.Z.X1				W.X1	
7	Kabupaten Mesuji			W.X3			BK.X3		Q.Z.X3	W.X3				
8	Kabupaten Lampung Barat						W.X1	BK.X1	Q.Z.X1				W.X1	
9	Kabupaten Tanggamus						BK.ZW.X4	Q.X4					W.X4	
10	Kabupaten Pringsewu			W.X2				BK.X2	Q.Z.X2				W.X2	
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat						W.X4	Q.X4		BK.Z.X4			W.X4	
12	Kabupaten Tulang Bawang			BK.Z.X4			W.X4	Q.X4					W.X4	
13	Kabupaten Pesawaran			W.X2	BK.X2				Q.Z.X2			PJb.X2	W.X2	
14	Kabupaten Way Kanan			W.X2			BK.X2		Q.Z.X2			PJb.X2	W.X2	
15	Kabupaten Pesisir Barat						W.X1	BK.X1	Q.Z.X1				W.X1	

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2020												Keterangan			
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des				
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD																
	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	RR.X2				A	U.P.X2	S.X2				NS.X2					A. Kementerian Dalam Negeri B. Kem Pendidikan & Kebudayaan
	2. Biro Hukum	RR.X4 V.Z.X4		MNP.X4 SRZ.X4		A		S.X4 U.X4			NPT.X4 SRZ.X4	S.U.T.X4					C. Kementerian Desa PDTT D. Kementerian Tenaga Kerja E. Kementerian PP dan PA
	3. Biro Organisasi				N.X3	A											F. Kementerian Pertanian G. Kementerian Koperasi & UKM
	4. Biro Perekonomian					A		N.X3									X. Inspektorat Provinsi
	5. Biro Administrasi Pembangunan	RR.X1		M.X1		A	N.X1	S.X1 U.X1				S.X1 U.X1					1: Irbn Wilayah 1 2: Irbn Wilayah 2 3: Irbn Wilayah 3
	6. Biro Kesejahteraan Sosial	RR.X2				A		S.X2 U.X2				UR.X2		N.X2			4: Irbn Wilayah 4 L: Kas Opname
	7. Biro Umum		RR.X4 V.Z.X4		MNP.X4 SRZ.X4	A		S.X4 U.X4				S.U.T.X4	N.P.X4 S.R.Z.X4				M: Evaluasi SAKIP OPD N: Pengawasan Reguler
	8. Biro Administrasi Pimpinan		RR.X4 V.Z.X4	MNP.X4 SRZ.X4		A		S.X4 U.X4			NPT.X4 SRZ.X4	S.U.T.X4					O: Audit Kinerja P: Evaluasi PPRG
	9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	RR.X4 V.Z.X4		MNP.X4 SRZ.X4		A		S.X4 U.X4			NPT.X4 SRZ.X4	S.U.T.X4					Q: Monev BOS R: PROBIT AUDIT
	10. Sekretariat DPRD	RR.X3 V.X3				U.X3	A	O.X3	N.X3	U.X3			T.X3 U.X3				S: Reviu PBJ T: REVIU RKA OPD U: Reviu Penyerapan Anggaran V: EVALUASI SPIP OPD W: MONEV DANA DESA Z: PENGAWASAN PROGRAM
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS																
	1. Inspektorat Provinsi					A											STRATEGIS KEPALA DAERAH
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	V.X2 RR.X2				A	U.P.X2 M.S.X2		T.X2			S.X2	T.X2 P.N.X2				RR: PENCAHPIANGAN RISK REGISTER OPD
	3. Badan Pengelkizan Keuangan dan Aset Daerah		RR.X4 V.Z.X4		MNP.X4 SRZ.X4	A		S.X4 U.X4				S.U.T.X4	NPT.X4 S.R.Z.X4				
	4. Badan Pendapatan Daerah	RR.X1 V.X1		M.X1		A		S.X1 U.X1				S.U.N.X1	T.X1 P.X1				

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2020												Keterangan		
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des			
5.	Badan Kepegawaian Daerah		RR.X4 V.Z.X4			A	MNP.X4 SRZ.X4	S.X4 U.X4				S.U.T.X4		NPT.X4 S.R.Z.X4	S.L.U.X4	A. Kementerian Dalam Negeri B. Kem Pendidikan & Kebudayaan C. Kementerian Desa PDTT D. Kementerian Tenaga Kerja E. Kementerian PP dan PA F. Kementerian Pertanian G. Kementerian Koperasi & UKM X. Inspektorat Provinsi 1 : Irbn Wilayah 1 2 : Irbn Wilayah 2 3 : Irbn Wilayah 3 4 : Irbn Wilayah 4 L : Kas Opname M : Evaluasi SAKIP OPD N : Pengawasan Reguler O : Audit Kinerja P : Evaluasi PPRG Q : Monev BOS R : PROBIT AUDIT S : Reviu PBJ T : REVIU RKA OPD U : Reviu Penyerapan Anggaran V : EVALUASI SPIP OPD W : MONEV DANA DESA Z : PENGAWASAN PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH RR : PENDAMPINGAN RISK REGISTER OPD
6.	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	RR.X3 V.X3		M.X3	S.X3 U.X3	A	N.X3		S.X3 U.X3		N.X3	T.X3 P.X3	S.X3 U.X3	L.X3 S.X3		
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RR.X1 V.X1		M.X1		A	N.X1	S.X1 U.X1			S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1		
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RR.X1 V.X1		M.X1		A		S.U.N.X1			S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1		
9.	Badan Penghubung	RR.X3 V.X3				A		N.X3						L.X3 N.X3		
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Badan Kesbangpol)	RR.X2				A		S.U.M.X2	NPT.X2		S.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2		
11.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	RR.X4 V.Z.X4			MNP.X4 SRZ.X4	A		S.X4 U.X4			S.U.T.X4	NPT.X4 S.R.Z.X4		S.L.U.X4		
12.	Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek	V.X2 RR.X2	O.X2			A		S.U.N.X2	T.X2 P.X2		S.X2	TR.X2 MP.X2	N.X2	S.X2 L.X2		
13.	Rumah Sakit Jiwa	V.X2 RR.X2				A	M.X2	S.X2 U.X2	T.X2 P.X2		NS.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2		
14.	Rumah Sakit Bandar Negara Husada	RR.X3 V.X3			S.X3 U.X3	A	N.X3		S.X3 U.X3			TSU.X3	N.X3	L.X3 N.X3		
III	DINAS - DINAS															
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		RR.X4 V.Z.X4	B	MNP.X4 SRZ.X4	A		S.X4 U.X4		B	S.U.T.X4		NPT.X4 SORZ.X4	S.L.U.X4		
2.	Dinas Kesehatan	V.X2 RR.X2	O.X2			A	M.X2	S.U.X2 N.R.X2	T.X2 P.X2		S.X2	T.X2 P.X2	N.X2	S.X2 L.X2		
3.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	RR.X3 V.X3			S.X3 U.X3	A		N.X3	S.X3 U.X3			TSU.X3		L.X3 N.X3		
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	RR.X1		M.X1	N.X1	A		S.X1 U.X1			S.X1 U.X1	T.X1 P.R.X1	N.X1	S.L.U.X1		
5.	Dinas Sosial	RR.X4 V.Z.X4				A	MNP.X4 SRZ.X4	S.X4 U.X4			S.U.T.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.L.U.X4		
6.	Dinas Tenaga Kerja	RR.X2				A	M.X2	S.X2 U.X2	T.X2 P.X2		NS.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2		
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RR.X3 V.X3	P.X3	MN.X3	S.X3 U.X3	A	O.X3		S.X3 U.X3	E	N.X3	TSU.X3		L.X3		
8.	Dinas Lingkungan Hidup	RR.X1		M.X1		A		S.U.N.X1			S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1		

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2020												Keterangan	
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RR.X4 V.Z.X4		M.N.P.X4 SRZ.X4		A		S.X4 U.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.U.T.X4			S.L.U.X4	A. Kementerian Dalam Negeri B. Kem Pendidikan & Kebudayaan C. Kementerian Desa PDTT D. Kementerian Tenaga Kerja E. Kementerian PP dan PA F. Kementerian Pertanian G. Kementerian Koperasi & UKM X. Inspektorat Provinsi 1: Irbn Wilayah 1 2: Irbn Wilayah 2 3: Irbn Wilayah 3 4: Irbn Wilayah 4 L : Kas Opname M : Evaluasi SAKIP OPD N : Pengawasan Reguler O : Audit Kinerja P : Evaluasi PPRG Q : Monev BOS R : PROBIT AUDIT S : Reviu FBI T : REVIU RKA OPD U : Reviu Penyerapan Anggaran V : EVALUASI SPIP OPD W : MONEV DANA DESA Z : PENGAWASAN PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH RR : PENDAMPINGAN RISK REGISTER OPD
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RR.X3 V.X3	P.X3	C M.X3	U.X3	A	N.X3		U.X3			TPU.X3	N.X3	L.X3	
11.	Dinas Perhubungan	RR.X3 V.X3	P.X3		R.X3	A	O.X3	N.X3	R.X3		N.X3	T.X3	R.X3 S.X3	L.X3 N.X3	
12.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V.X2 RR.X2				A	U.P.X2 M.S.X2		T.X2		S.X2	T.X2 P.N.X2		S.X2 L.X2	
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V.X2 RR.X2				A	U.P.X2 M.S.X2		T.X2		G N.X2 S.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2	
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V.X2 RR.X2	O.X2			A	M.X2	S.X2 U.X2	PTN.X2		S.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2	
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	RR.X1 V.X1		M.X1		A		S.U.N.X1			S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1	
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RR.X4 V.Z.X4				A	MNP.X4 SRZ.X4	S.X4 U.X4			S.U.T.X4		NPT.X4 SORZ.X4	S.L.U.X4	
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	RR.X1 V.X1	O.X1	M.X1		A	N.X1	S.X1 U.X1			S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1	
18.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RR.X3 V.X3	P.X3	M.X3	S.X3 U.X3	A	N.X3 O.X3		S.X3 U.X3		N.X3	S.U.X3 T.P.X3		L.X3	
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan	V.X2 RR.X2	O.X2		F	A	N.X2	S.U.P.X2	T.X2		RS.X2	T.X2 P.N.X2		S.X2 L.X2	
20.	Dinas Perkebunan	RR.X1 V.X1		M.X1		A		S.X1 U.X1			S.X1 U.X1	T.X1 P.X1	N.X1	S.L.U.X1	
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	RR.X1 V.X1	O.X1	M.X1		A		S.X1 U.X1			S.X1 U.X1	T.X1 R.P.X1	N.X1	S.L.U.X1	
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RR.X3 V.X3		N.X3	S.X3 U.X3	A			S.X3 U.X3		N.X3	S.U.T.X3		L.X3	
23.	Dinas Kehutanan	RR.X1 V.X1	O.X1	M.X1		A		S.X1 U.X1			S.U.N.X1	T.X1 R.P.X1		S.L.U.X1	
24.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral		RR.X4 V.Z.X4			A	MNP.X4 SRZ.X4	S.X4 U.X4			S.U.T.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.L.U.X4	
25.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	RR.X1	O.X1	M.X1		A		S.X1 U.X1			S.X1 U.X1	T.X1 R.P.X1	N.X1	S.L.U.X1	

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2020												Keterangan			
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des				
IV	Reviu RKPD			X													X : Inspektorat Provinsi
	Reviu RKPD - Perubahan								X								
	Reviu LKPD			X													
	Reviu LAKIP			X													
	Evaluasi LPPD							X									
	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP BPK, Ijen Kemendagri dan APIP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Evaluasi SAKIP Kab/kota									X	X						
	Rencana Aksi, Monitoring dan Pencegahan Korupsi			X			X			X					X		
	Rakorwasda	X											X				
	Penilaian Internal ZIWBK	X	X	X	X	X											
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Operasional Saber Pungli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi						X	X		X			X				
	Verifikasi LHKPN	X													X		
	Konsultasi															X	
	Tindakanjutt Pengaduan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Audit Tujuan Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Telaah Sejawat																
Monitoring dan Evaluasi Dana Desa			X2,3			X1,3,4				X3				X1,2,4			
Pengawasan Program Strategis Kepala Daerah	X4	X4	X4			X4	X4	X1,2,3	X4								
Pemeriksaan SMA/SMK Kabupaten (Monev BOS)							X4	X1,2,3									

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI